

Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Wulandari ^{1*}, Nurdiawansyah ²

^{1*,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

Email : wulandari.19021041@student.ubl.ac.id ^{1*}, nurdiawansyah@ubl.ac.id ²

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Sebanyak 36 sampel digunakan dalam proses pengumpulan data yang melibatkan penyebaran kuesioner melalui google form ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Diolah dengan Statistical Pruduct and Service Soluction versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Standar Akuntansi Pemerintah; Pengawasan Intern Pemerintah; Kualitas Informasi LKP.

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of Human Resource Competence, Application of Government Accounting Standards, and Government Internal Control on the Information Quality of Regional Government Financial Reports in Bandar Lampung City. A total of 36 samples were used in the data collection process which involved distributing questionnaires via Google from to the Regional Work Unit (SKPD) in the Bandar Lampung City Government office. The data analysis method used was multiple linear regression analysis which included validity, reliability, assumption tests, classical, and hypothesis testing. Processed with Statistical Pruduct and Service Solution version 17. The results showed that Human Resource Competence had a positive and significant effect on the Quality of Financial Report Information for the Regional Government of Bandar Lampung City. Application of Government Accounting Standards has a positive and significant effect on the Information Quality of Regional Government Financial Reports of Bandar Lampung City. Government Internal Control has a positive and significant effect on the Information Quality of the Regional Government Financial Reports of Bandar Lampung City.

Keywords: Competency of Human Resources; Government Accounting Standards; Government Internal Supervision; LKPD Information Quality.

Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai pengelolaan keuangan publik. Kualitas laporan ini sangat memengaruhi bagaimana pihak-pihak terkait baik itu masyarakat, legislatif, maupun lembaga pengawasan menilai kinerja pemerintahan. Untuk itu, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah harus memenuhi standar tertentu agar dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan dan kegiatan operasional pemerintah (Sukmaningrum & Harto, 2012; Yuliani & Agustini, 2016). Secara umum, laporan keuangan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai cermin dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Laporan yang dapat dipercaya akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pembangunan daerah. Salah satu cara untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dengan melihat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan indikator bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sementara opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengindikasikan adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki meski secara umum laporan masih bisa dipertanggungjawabkan (Yuliani & Agustini, 2016). Meskipun peraturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan sudah jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih ada berbagai tantangan dalam pencapaian kualitas laporan yang ideal. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran 2021 menerima opini WDP dari BPK. Beberapa masalah yang ditemukan termasuk penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak sesuai dengan ketentuan, pencatatan utang yang kurang tepat, dan pengelolaan aset yang tidak terorganisir dengan baik (Kupas Tuntas, 2022). Temuan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi dan perbaikan dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat mencapai standar yang

lebih baik di masa depan. Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada tiga aspek utama: kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pengawasan intern pemerintah. Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang menangani laporan keuangan menjadi kunci untuk menghasilkan informasi yang tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Qomah (2021) dan Kusnadi *et al.* (2022), kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan akan meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan dan memperbaiki kualitas informasi yang disampaikan. Di sisi lain, penerapan standar akuntansi pemerintah yang tepat juga memainkan peran yang sangat besar dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Laporan yang disusun tanpa mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang jelas dan konsisten berpotensi menghasilkan informasi yang kurang akurat dan menyesatkan (Setyowati *et al.*, 2016).

Oleh karena itu, penerapan standar yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan *intern* yang baik juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga akurasi laporan keuangan. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Surastiani & Handayani (2015) mengemukakan bahwa pengawasan yang ketat dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan dengan memastikan bahwa semua langkah pengelolaan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketiga faktor tersebut kompetensi SDM, penerapan standar akuntansi, dan pengawasan *intern* mempengaruhi kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat daerah dan

memberikan wawasan bagi perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan publik ke depan. Teori Keagenan (*Agency Theory*) menguraikan hubungan antara dua pihak, yaitu agen dan prinsipal. Agen bertindak untuk kepentingan prinsipal dengan tujuan untuk mengelola sumber daya atau membuat keputusan atas nama prinsipal. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik, sementara masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, seperti lembaga pengawas dan legislatif, bertindak sebagai prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan ini sering kali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi terkait pengelolaan keuangan dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan agen mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan prinsipal. Masalah ketidakseimbangan informasi ini berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh agen (pemerintah), karena terdapat kemungkinan bahwa laporan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang akurat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat dipercaya dan sesuai dengan kepentingan publik, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat. Fama dan Jensen (1983) menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif dapat membantu meminimalkan potensi penyimpangan antara kepentingan agen dan prinsipal. Dalam hal ini, pengawasan internal yang baik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Teori ini memberi dasar pemahaman bahwa pengawasan yang baik dan mekanisme akuntabilitas yang kuat dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan penuh tanggung jawab.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research*, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti.

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 5. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung. Sampel yang digunakan adalah staf yang bekerja di bagian keuangan dan administrasi keuangan pada SKPD tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Metode Analisis Data

1) Analisis Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh. Analisis deskriptif akan mencakup ukuran pemusatan data, distribusi data, dan lokasi kumpulan data, sehingga dapat diperoleh pemahaman awal terkait karakteristik data yang dianalisis.

2) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian ini dilakukan dengan teknik korelasi *product moment* dari Pearson. Suatu item dianggap valid jika nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel* pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan.

3) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi atau kestabilan kuesioner sebagai alat ukur. Kuesioner dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Nilai tersebut menjadi dasar penilaian apakah instrumen yang digunakan dapat dipercaya untuk mengukur variabel yang dimaksud.

Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen positif atau negatif. Menurut Ghozali (2013), persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y = Kualitas laporan keuangan

α = Konstanta, yaitu nilai Y ketika semua variabel bebas = 0

β = Koefisien, yaitu perubahan nilai tiap variabel bebas. Jika koefisien positif maka akan

meningkatkan nilai variabel bebas dan jika koefisien negative maka akan menurunkan nilai variabel bebas.

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X_3 = Pengawasan Intern Pemerintah

ε = eror

Uji Asumsi Klasik

1) Normalitas

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan uji P-P plot dari regresi standar. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi terdistribusi normal. Jika titik-titik pada plot tersebut mendekati garis diagonal, maka data dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas.

2) Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Sebaliknya, multikolinearitas dianggap ada jika nilai VIF lebih besar dari 10, yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen yang dapat mengganggu stabilitas estimasi koefisien regresi.

3) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Ghazali (2013) menjelaskan bahwa ketidaksamaan ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam model yang perlu diperbaiki. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual model memiliki varian yang sama (homoskedastisitas), yang menjadi salah satu asumsi dasar dalam regresi linier.

4) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

secara individual. Dikatakan bahwa faktor independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi t kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 (Ghozali, 2013). Dengan kata lain, jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima.

5) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model secara keseluruhan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai F-hitung dan membandingkannya dengan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka model regresi dianggap layak.

6) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, di mana semakin mendekati angka 1, semakin baik model dalam menjelaskan variasi data. Koefisien determinasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Survei ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara daring melalui Google Form kepada 57 responden yang merupakan staf bagian keuangan atau administrasi keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Daftar Distribusi Kuesioner Penelitian
SKPD Kota Bandar Lampung

No	Unit Kerja	Kuesioner yang dibagikan	Kuesioner yang direspon	Kuesioner yang tidak direspon
1	Dinas Pangan	7	5	2
2	Dinas Perindustrian	3	2	1
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	2	2	-
4	Dinas Koperasi dan UKM	6	5	1
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6	4	2
6	BPPRD	10	5	5
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6	2	4
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	5	2	3
9	Dinas Perdagangan	7	5	2
10	Dinas Sosial	5	4	1
Jumlah		57	36	21

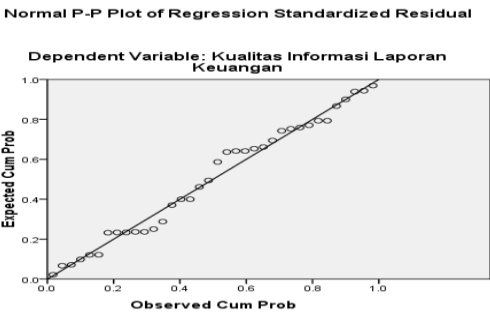
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cranbach Alpha	Simpulan
Kompetensi SDM	0.566	Realibel
Standar Akuntansi Pemerintah	0.928	Realibel
Pengawasan Intern Pemerintah	0.675	Realibel
Kualitas Informasi LKPD	0.840	Realibel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel di atas, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memperoleh nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,566, variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,928, variabel Pengendalian Intern Pemerintah (X3) memperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,675, dan variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y) menunjukkan tingkat reliabilitas sebesar 0,840. Nilai Cronbach's alpha untuk masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,60, yang menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan metode P-P plot dari regresi standar untuk menguji apakah data residual terdistribusi normal.



Gambar 1. Uji Normalitas Data

Berdasarkan *output* “chart” diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik *ploting* yang terdapat pada gambar selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	-8.548	3.596		-2.377	.024
Sumber daya manusia	.744	.229	.360	3.251	.003
Standar Penerapan Akuntansi	.234	.094	.376	2.490	.018
Pengawasan Intern Pemerintah	.540	.240	.273	2.251	.031

a. Dependent Variabel: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa semua variabel penelitian nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang

digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki problem multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficient	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	4.835	1.792		2.698	.011
Sumber Daya Manusia	-.160	.114	-.373	-1.406	.169
Penerapan Standar Akuntansi	.042	.047	.328	.907	.371
Pengawasan Intern Pemerintah	-.112	.120	-.273	-.941	.354

a. Dependent Variabel: ABRESID

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,169, untuk Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,371, dan untuk Pengawasan Intern Pemerintah sebesar 0,354. Karena nilai signifikansi ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Pada uji regresi linier berganda, variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), sementara variabel independennya meliputi Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), dan Pengendalian Intern Pemerintah (X3). Berdasarkan hasil analisis regresi, model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = a + 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + s$$
$$Y = -8.548 + 0,744X_1 + 0,234X_2 + 0,540X_3 + s$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), dan Pengendalian Intern Pemerintah (X3) tidak ada atau bernilai nol, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan tetap berada pada nilai konstanta sebesar -8,548 poin.
- 2) Koefisien untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) adalah 0,744. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin pada kompetensi sumber daya manusia, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan, akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,744 poin. Sebagai contoh, jika kompetensi sumber daya manusia

meningkat 1 poin, maka kualitas laporan keuangan diprediksi akan naik sebesar 0,744 poin, dengan nilai konstanta -8,548.

- 3) Koefisien untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) adalah 0,234. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 poin dalam penerapan standar akuntansi pemerintah, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sebesar 0,234 poin. Jadi, jika standar akuntansi pemerintah meningkat 1 poin, kualitas laporan keuangan diprediksi akan meningkat sebesar 0,234 poin, dengan konstanta -8,548.
- 4) Koefisien untuk variabel Pengendalian Intern Pemerintah (X3) adalah 0,540. Ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 poin dalam pengendalian intern pemerintah, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan, akan meningkatkan kualitas

informasi laporan keuangan sebesar 0,540 poin. Sebagai contoh, jika pengendalian intern pemerintah meningkat 1 poin, kualitas laporan keuangan diprediksi akan meningkat sebesar 0,540 poin, dengan nilai konstanta -8,548.

- 5) Nilai koefisien regresi untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) yang lebih besar dibandingkan dengan koefisien regresi variabel lainnya menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	459.106	3	153.035	58.219	.000 ^a
Residual	84.116	32	2.629		
Total	543.222	35			

Hasil uji F berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa $F_{hitung} (58,219) > F_{tabel} (3,285)$ dengan $sig\ 0,000 < = 0,05$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak. Kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia , standar

akuntansi pemerintah dan pengwasan intern pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 6. Uji T

T_{hitung}	$T_{tabel} (n-2; \alpha 0,05)$	Kondisi	Kesimpulan
3.251 (sig. 0,003)	2,037	$t_{hitung} > t_{tabel} (0,003 < 0,05)$	H_o ditolak dan H_a diterima
2.490 (sig. 0,018)	2,037	$t_{hitung} > t_{tabel} (0,018 < 0,05)$	H_o ditolak dan H_a diterima
2.251 (sig. 0,031)	2,037	$t_{hitung} > t_{tabel} (0,031 < 0,05)$	H_o ditolak dan H_a diterima

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Nilai *t-bitung* sebesar 3,251 lebih besar dari nilai *t-tabel* sebesar 2,037 untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1). Dengan nilai signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak. Kesimpulannya, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)

Nilai *t-bitung* sebesar 2,490 lebih besar dari nilai *t-tabel* sebesar 2,037 untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X2). Dengan nilai signifikansi 0,018 yang lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak. Kesimpulannya, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern Pemerintah (X3)

Nilai *t-bitung* sebesar 2,251 lebih besar dari nilai *t-tabel* sebesar 2,037 untuk variabel Pengawasan Intern Pemerintah (X3). Dengan nilai signifikansi 0,031 yang lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Kesimpulannya, pengawasan intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinan R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.919 ^a	.845	.831	1.621

Berdasarkan tabel di atas dan SPSS V.17, *Adjusted R Square* variabel bebas adalah 0,831. Dengan kata lain, variabel independen model dapat menjelaskan 83,1% d, sedangkan sisanya 17,9% dijelaskan variabel lain.

dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asyiyhatul (2017), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama dalam kelancaran pengelolaan suatu organisasi, di mana kompetensi yang memadai menentukan apakah organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penerapan standar akuntansi pemerintah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, mengindikasikan bahwa standar yang jelas dan konsisten sangat penting dalam memastikan keandalan laporan keuangan.

Selain itu, standar akuntansi pemerintah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Herlinda (2016), yang menekankan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat menjadi acuan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai acuan baku dalam penyusunan laporan, standar akuntansi pemerintah memegang peran vital dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Tak kalah pentingnya, pengawasan intern pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, sesuai dengan temuan penelitian Aminah *et al.* (2020). Pengawasan intern, yang melibatkan kebijakan dan praktik yang memastikan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku, memiliki peran kunci

Pengawasan intern pemerintah, yang meliputi kebijakan dan praktik pengendalian internal, juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi, dan pengawasan *intern* merupakan elemen kunci yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Aminah, A., Khairudin, K., & Indrayenti, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan*

- Keuangan Universitas Bandar Lampung*, 10(1), 22-33.
- Djawang, R. R. P., Made, A., & Sari, A. R. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i2.4257>.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403-428.
- Pradono, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(2).
- Fitri, S. L., & Alam, I. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(10), 2057-2070. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.301>.
- Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 9-20. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14>.
- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51-63. <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accountability*, 5(2), 98-109.
- Maydiyanti, S., & Putri, A. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69-78.
- Pura, R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 1-13. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316>.
- Qomah, S. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95-108.
- Safitri, E. N., & Zulkarnain, P. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 225-234.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179-191. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843>.
- Sukmaningrum, T., & Harto, P. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139-149.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64.